

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**



**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

30 JUNI 2026



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
Gedung DPRD Kabupaten Kebumen Jl. Merdeka No 6 Kebumen
Telepon 0287-381674 HP: 081382016131



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025**

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.***

**Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Para Wakil Ketua dan Seluruh
Rekan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen**

Ysh. Bupati Kebumen

Ysh. Wakil Bupati Kebumen

**Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Kabag Setda dan
Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Pimpinan BUMD serta Segenap Jajaran
Eksekutif**

Ysh. Sekretaris DPRD dan Para Staf

Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen

**Ysh. Segenap Insan pers, hadirin tamu undangan dan seluruh
masyarakat Kabupaten Kebumen yang mengikuti acara ini melalui
radio In FM yang berbahagia.**

Mengawali penyampaian Pandangan Umum **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT *biquolina tahmid* "Alhamdulillahirobbil'alamiin" yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri forum yang terhormat ini, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dalam keadaan sehat *wal 'afiat*. Mudah-mudahan Allah SWT meridloi segenap usaha kita dalam merancang dan menyusun serta menetapkan peraturan daerah yang berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sholawat dan Salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan **Nabi Agung Muhammad SAW**. Sang panutan dan penuntun kepada akhlak mulia. Semoga senantiasa kita dapat meneladani sikap dan perilaku Beliau dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa keberkahan, kemanfaatan bagi diri pribadi kita khususnya, serta

keberkahan kemanfaatan bagi Kebumen tercinta, menuju kota Kebumen yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

Hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi izinkan kami **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama : Merupakan suatu kehormatan bagi kami **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk itu kami menyampaikan ucapan terimakasih :

- Kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi kami.
- Kepada Bupati Kebumen dan jajaran eksekutif, yang telah menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2025 beserta penjelasannya kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Kedua : Masih dibulan muharrom, yang diperingati sebagai tahun baru bagi warga muslim, izinkan kami **Fraaksi Partai Persatuan Pembangunan** mengucapkan selamat tahun baru islam 1447 H. Mari jadikan tahun baru hijriah ini sebagai momen untuk bermuhasabah atas apa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama. Kullu 'am wa antum bikhair.

Hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati

Perlu kita pahami bersama bahwa berdasarkan Pasal 296-297 Permendagri 13/2006, Ketentuan tersebut memberi amanat kepada Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 298 Permendagri 13/2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyampaian Raperda PP

APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya mencermati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kami **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** menanggapi hal-hal sebagai berikut:

1. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengucapkan selamat atas predikat WTP dan penghargaan *National Governance Awards 2026* yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Kami meminta pencapaian ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan angka kemiskinan dengan cara melaksanakan program pemerintah dengan benar-benar efektif, efisien yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2. Realisasi pendapatan mencapai 102,17% (seratus dua koma tujuh belas persen) dari target sebesar Rp3.004.119.240.372,00 (tiga triliun empat milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh

ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Semoga realisasi ditahun berjalan bisa lebih baik sehingga mampu menggenjot pembangunan di Kabupaten Kebumen serta meningkatkan lapangan pekerjaan.

3. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** juga mengapresiasi pelampauan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 102,03% (*seratus dua koma nol tiga persen*), yang dapat kita lihat dari 4 komponen yaitu Pajak Daerah mencapai 95,64%, Retribusi Daerah 105,32%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 113,59%, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 122,32%. Pelampauan target ini harus diimbangi oleh pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas layanan publik dan investasi berkelanjutan pada infrastruktur. Selain itu untuk meningkatkan PAD **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mendorong agar tempat pariwisata yang dikelola Pemerintah

Daerah agar melakukan transformasi tata kelola agar lebih profesional dan berdaya saing, serta meningkatkan fasilitas dan melakukan pengembangan pemasaran digital.

4. Pendapatan asli daerah sebesar Rp580.484.058.430,00 (lima ratus delapan puluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Hanya satu sektor pendapatan asli daerah dari APBD 2025 yang tidak mencapai target, yaitu sektor pajak yang hanya tercapai 95,64%. Permasalahan tidak tercapainya target pada sektor tersebut merupakan permasalahan klasik yang sudah lama terjadi. Kami meminta agar menjadi evaluasi bersama agar target pendapatan asli daerah pada sektor tersebut tercapai, serta meminta agar dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Realisasi Belanja Tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.026.233.409.159,00 (tiga triliun dua puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)

apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 3,21% (tiga koma dua satu persen). **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta agar penurunan penyerapan anggaran belanja ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalahnya, dievaluasi dampaknya terhadap pelayanan publik, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan manajemen anggaran agar penyerapan di tahun berikutnya lebih optimal.

6. Terdapat beberapa pos belanja yang capaian prosentasenya dibawah 80% diantaranya urusan pemerintahan bidang pertanian pada belanja daerah hanya terserap 72,68%, bahkan untuk belanja barang dan jasa hanya terserap sebesar 59,66%, mohon dapat disampaikan dan dijelaskan secara terperinci permasalahan dan solusi dari setiap pos belanja yang terealisasi dibawah 80%. Rendahnya serapan belanja memang tidak serta merta berbanding lurus dengan rendahnya kinerja dan sebaliknya. Kami sangat mengapresiasi perangkat daerah yang berprestasi

sekaligus efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan. Akan tetapi kami berpendapat bahwa Realisasi belanja daerah di bawah 80% mengindikasikan tata kelola anggaran yang buruk. Kondisi ini menyebabkan lambatnya perputaran ekonomi lokal, mandeknya pembangunan fasilitas publik, dan menumpuknya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Masalah ini berakar dari rendahnya perencanaan hingga konflik politis. Oleh karena itu kami terus mendorong penguatan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun DPRD.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Sebelum kami akhiri, atas nama **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** kami meminta kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kebumen untuk segera membahas Raperda tersebut dengan memperhatikan waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian penyampaian Pandangan Umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya apabila dalam penyampaian Pandangan Umum banyak hal-hal yang kurang berkenan, atas nama **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

***Wallohul Mustangan ilaa Sabilirridwan.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.***

Kebumen, 30 Juni 2026

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



SRI KHALIMAH, S.Sos.

Sekretaris



AGUNG NUR WAHID, SH., MH.